

Implementasi *Work from anywhere* (WFA) sebagai Upaya Efisiensi Anggaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

Putri Resi Cantika Dewi¹, Finnah Fourqoniah²

^{1,2}Universitas Mulawarman Samarinda, Indonesia

E-mail: putriresi.c@gmail.com¹, fourqoniah@fisip.unmul.ac.id²

Article History:

Received: 21 Juni 2026

Revised: 02 Juli 2026

Accepted: 07 Juli 2026

Keywords: *Work from anywhere; efisiensi anggaran; kinerja pegawai; transformasi digital; birokrasi pemerintah; kerja hibrida.*

Abstract: *Transformasi digital di sektor publik mendorong pemerintah mengadopsi pola kerja yang lebih fleksibel untuk meningkatkan efisiensi organisasi tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Salah satu pendekatan yang berkembang adalah penerapan Work from anywhere (WFA), yang masih memerlukan evaluasi terhadap efektivitas implementasinya di lingkungan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Work from anywhere sebagai strategi efisiensi anggaran serta dampaknya terhadap kinerja pegawai di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif melalui wawancara mendalam dan analisis terhadap pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kerja hibrida mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi melalui pengurangan biaya operasional sekaligus memberikan fleksibilitas yang mendukung produktivitas dan keseimbangan kerja pegawai. Meskipun demikian, efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur digital, keandalan aplikasi pendukung, serta mekanisme pengawasan kinerja yang belum sepenuhnya optimal. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan Work from anywhere bergantung pada integrasi teknologi, tata kelola kinerja, dan penguatan kapasitas organisasi untuk mendukung transformasi birokrasi yang adaptif dan berkelanjutan.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya transformasi signifikan dalam sistem kerja organisasi, termasuk di instansi pemerintah. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah munculnya konsep kerja fleksibel seperti *Work from home* (WFH) dan berkembang menjadi *Work from anywhere* (WFA), yang memungkinkan pegawai bekerja dari berbagai lokasi tanpa terbatas pada kantor konvensional. Perubahan ini semakin dipercepat sejak

pandemi Covid-19, yang memaksa organisasi untuk beradaptasi dengan sistem kerja jarak jauh guna menjaga keberlangsungan operasional serta meminimalisir risiko penyebaran virus (Siregar & Febrina, 2022).

Dalam instansi pemerintah, kinerja pegawai menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan untuk mencapai tujuan. Kinerja tidak hanya diukur dari hasil kerja, tetapi juga mencakup proses, kualitas, kuantitas, serta efektivitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan (Suciyawati, 2025). Oleh karena itu, perubahan sistem kerja seperti WFA perlu dikaji secara mendalam karena berpotensi mempengaruhi kinerja pegawai, baik secara positif maupun negatif.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem kerja fleksibel dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja pegawai. Fleksibilitas waktu dan tempat kerja dalam skema WFA terbukti mampu meningkatkan kreativitas, kualitas hasil kerja, serta ketepatan waktu penyelesaian tugas (Suciyawati, 2025). Selain itu, WFA juga dapat meningkatkan work-life balance dan kepuasan kerja pegawai (Fauziah et al., 2026). Di sisi lain, sistem ini juga berpotensi menciptakan efisiensi dari segi waktu, biaya operasional, dan penggunaan sumber daya, sehingga dapat mendukung upaya penghematan anggaran.

Dalam kebijakan publik di Indonesia, transformasi dari *Work from home* (WFH) menuju *Work from anywhere* (WFA) juga didorong oleh regulasi pemerintah yang mengatur fleksibilitas kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca pandemi. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai, tetapi juga sebagai strategi efisiensi anggaran melalui pengurangan biaya operasional seperti penggunaan fasilitas kantor, transportasi, dan konsumsi energi (Fauziah et al., 2026).

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur (DISPORA Prov Kaltim) sebagai salah satu instansi pemerintah daerah turut menghadapi tuntutan untuk meningkatkan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas kinerja. Oleh karena itu, implementasi WFA menjadi salah satu alternatif kebijakan yang relevan untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam melihat sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerja pegawai. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *Work from anywhere* (WFA) sebagai upaya efisiensi anggaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, serta mengkaji dampaknya terhadap kinerja pegawai di lingkungan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam terkait implementasi *Work from anywhere* (WFA) sebagai upaya efisiensi anggaran. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memahami kondisi nyata di lapangan serta menggali makna dari perspektif subjek penelitian secara utuh dan menyeluruh (Waruwu, 2023).

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, yang menjadi objek penelitian dalam melihat bagaimana implementasi kebijakan WFA di lingkungan instansi pemerintah daerah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansinya dengan topik penelitian, khususnya dalam konteks efisiensi anggaran dan transformasi sistem kerja birokrasi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik utama dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari informan melalui proses tanya jawab guna menggali informasi yang

mendalam (Rachmawati, 2007). Melalui wawancara, peneliti dapat memahami pengalaman, persepsi, serta pandangan informan terkait implementasi WFA dalam organisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Work from anywhere (WFA) merupakan konsep kerja fleksibel yang memungkinkan pegawai melaksanakan tugas dari berbagai lokasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam instansi pemerintah, penerapan WFA menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan efisiensi anggaran, melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun, dengan Rp256,1 triliun berasal dari belanja Kementerian/Lembaga dan Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah (Kompas, 2025). Langkah ini mencakup pengurangan biaya operasional dan perjalanan dinas hingga 50 persen. Penerapan WFA di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan efisiensi anggaran serta mendorong transformasi budaya kerja berbasis digital. Kebijakan ini mulai diterapkan sejak 13 Februari 2026 melalui Surat Edaran pemerintah daerah Nomor 100.3.4/739/B.ORG-II/2026 yang ditandatangani Gubernur Kalimantan Timur sebagai langkah efisiensi 2026. Ketentuan bagi pegawai yang bekerja di luar kantor adalah:

1. Pegawai wajib melakukan absensi secara daring melalui aplikasi Sistem Absensi Online (SAO) sesuai waktu yang ditetapkan, 06.30 hingga 07.30
2. Berkewajiban menjaga disiplin kerja, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan memenuhi target kinerja yang telah ditentukan
3. Memastikan ketersediaan perangkat kerja, akses internet, serta aktif dalam komunikasi dan koordinasi melalui media digital yang digunakan instansi. Pegawai harus tetap dapat dihubungi sewaktu-waktu pada jam kerja apabila diperlukan untuk koordinasi, rapat, atau tugas kedinasan lainnya
4. Pegawai diwajibkan hadir di kantor apabila terdapat kegiatan penting, pelayanan langsung, rapat, atau pekerjaan yang memerlukan kehadiran fisik
5. Menyampaikan laporan pekerjaan dan capaian kinerja secara berkala melalui sistem monitoring kinerja melalui e-SAKIP.

DISPORA Prov Kaltim melaksanakan WFA dengan sistem kerja hybrid, di mana pegawai bekerja di kantor pada hari senin hingga kamis, sedangkan pada hari jumat pekerjaan dilakukan secara fleksibel dari luar kantor. Pola kerja ini memungkinkan seluruh tugas, khususnya yang bersifat administratif tetap dapat diselesaikan tanpa harus dilakukan secara langsung di kantor. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik pekerjaan sangat mendukung pelaksanaan sistem kerja fleksibel. Kondisi ini sejalan dengan konsep telecommuting yang menyatakan bahwa pekerjaan berbasis digital lebih mudah diadaptasikan dalam sistem kerja jarak jauh (Bataha & Fauziah, 2020).

Dalam pelaksanaannya, penerapan WFA memberikan perubahan signifikan terhadap pola kerja pegawai DISPORA Prov Kaltim. Pegawai tidak lagi bekerja secara terpusat di kantor, melainkan memanfaatkan teknologi digital untuk menyelesaikan pekerjaan. Seperti yang ditemukan pada penelitian sebelumnya, penggunaan media komunikasi seperti aplikasi daring menjadi sarana utama dalam mendukung koordinasi kerja. Kinerja pegawai dalam penerapan WFA juga menunjukkan bahwa produktivitas kerja tetap terjaga bahkan cenderung meningkat. Fleksibilitas kerja memberikan kenyamanan dalam penyelesaian tugas, sehingga berdampak positif terhadap hasil kerja. Selain itu, terdapat kecenderungan dukungan terhadap kebijakan ini, yang tercermin dari harapan untuk meningkatkan pelaksanaan WFA dalam satu minggu. Hal tersebut menunjukkan bahwa WFA tidak hanya berkontribusi terhadap efisiensi anggaran, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kepuasan kerja pegawai.

Penerapan kebijakan WFA memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi anggaran pemerintah. Penurunan kehadiran pegawai di kantor berkontribusi pada berkurangnya penggunaan sumber daya operasional, seperti listrik, air, fasilitas kantor, serta kebutuhan alat tulis kantor. Kondisi ini secara langsung tentu menekan beban pengeluaran rutin. Instansi pemerintah juga melakukan pemangkasan perjalanan dinas dengan menerapkan prinsip efisiensi anggaran, yaitu hanya melaksanakan perjalanan dinas yang bersifat prioritas dan mendesak. Kebijakan ini berdampak pada penurunan pengeluaran untuk transportasi dan akomodasi, sehingga mendukung optimalisasi penggunaan anggaran secara keseluruhan.

Selain itu kebijakan ini dinilai efektif dalam meningkatkan efisiensi anggaran karena instansi pemerintah dapat mengalokasikan dana yang sebelumnya digunakan untuk kebutuhan operasional kantor ke sektor yang lebih prioritas. Efisiensi tersebut juga terlihat dari berkurangnya biaya pemeliharaan gedung dan fasilitas kerja akibat menurunnya intensitas penggunaan ruang kantor selama penerapan sistem kerja fleksibel. Di sisi lain, penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaan WFA turut mendukung terciptanya sistem kerja yang lebih hemat biaya dan efisien. Berbagai kegiatan rapat, koordinasi, maupun pelatihan dapat dilakukan secara daring melalui platform digital seperti zoom, google meet, google drive, dan whatsapp yang penggunaannya tanpa memerlukan biaya yang besar. Ini menunjukkan bahwa transformasi digital yang dipercepat selama pandemi tidak hanya membantu menjaga keberlangsungan pelayanan pemerintahan, tetapi juga menciptakan pola kerja baru yang lebih adaptif dan ekonomis. Dengan begitu, kebijakan WFA tidak hanya menjadi solusi sementara pada masa pandemi Covid-19, tetapi juga dapat dipandang sebagai strategi jangka panjang dalam mendukung efisiensi pengelolaan anggaran pemerintah.

Namun pada tahap awal penerapan, proses adaptasi WFA tidak berjalan sepenuhnya lancar. Kendala utama yang dihadapi berkaitan dengan penggunaan teknologi digital, khususnya pada aplikasi Sistem Absensi Online (SAO), serta aplikasi administrasi internal seperti SRIKANDI yang masih sering mengalami gangguan. Ketidakstabilan sistem dan jaringan tersebut berdampak pada terhambatnya proses penyelesaian pekerjaan. Termasuk absensi dilakukan secara online melalui Sistem Absensi Online (SAO) versi 2 berbasis Android yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD). ASN diwajibkan melakukan presensi pada pukul 06.30 hingga 07.30 WITA, di mana sistem akan secara otomatis tertutup di luar rentang waktu tersebut dan pegawai yang tidak melakukan absensi tepat waktu akan dianggap terlambat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa fleksibilitas kerja yang diterapkan diiringi dengan mekanisme kontrol yang ketat. Di sisi lain, kendala teknis seperti gangguan jaringan dan sistem turut memengaruhi kelancaran pelaksanaan WFA, khususnya dalam proses administrasi dan pelaporan kinerja.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kesiapan infrastruktur teknologi menjadi faktor krusial dalam mendukung keberhasilan implementasi WFA. Rachmawati (2007) menyatakan bahwa efektivitas kerja jarak jauh sangat dipengaruhi oleh kualitas teknologi informasi dan stabilitas jaringan yang digunakan. Selain itu keterbatasan infrastruktur digital dan kesiapan teknologi menjadi salah satu tantangan utama dalam penerapan sistem kerja fleksibel di sektor publik. Dari aspek pengawasan, sistem monitoring dalam pelaksanaan WFA DISPORA Prov Kaltim masih perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan. Meskipun pegawai diwajibkan menyampaikan laporan kinerja melalui e-SAKIP secara berkala, baik mingguan maupun triwulanan, pengawasan langsung dari pimpinan masih relatif terbatas. Kondisi ini berimplikasi pada potensi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan serta belum optimalnya kontrol terhadap kinerja pegawai.

Secara keseluruhan, implementasi WFA di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dapat dinilai cukup efektif, terutama dalam meningkatkan efisiensi anggaran dan fleksibilitas kerja. Namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, khususnya pada

kesiapan infrastruktur teknologi dan optimalisasi sistem pengawasan. Keberhasilan pelaksanaan sistem kerja fleksibel pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh kesiapan teknologi, tingkat kedisiplinan pegawai, serta efektivitas mekanisme monitoring yang diterapkan.

KESIMPULAN

Implementasi *Work from anywhere* (WFA) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa kebijakan kerja fleksibel berbasis digital mampu memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi anggaran dan peningkatan fleksibilitas kerja pegawai. Melalui pola kerja hybrid, instansi pemerintah berhasil menekan biaya operasional seperti penggunaan listrik, fasilitas kantor, serta perjalanan dinas, tanpa mengurangi produktivitas pegawai. Bahkan, dalam beberapa aspek, kinerja pegawai cenderung meningkat seiring dengan adanya kenyamanan dan fleksibilitas dalam bekerja.

Namun keberhasilan implementasi WFA belum sepenuhnya optimal. Kendala utama masih terletak pada kesiapan infrastruktur teknologi, seperti gangguan pada aplikasi pendukung, serta keterbatasan jaringan internet yang menghambat kelancaran pekerjaan. Dengan demikian WFA terbukti efektif sebagai strategi efisiensi anggaran dan transformasi budaya kerja digital, dengan catatan optimalisasi implementasinya memerlukan penguatan pada aspek infrastruktur teknologi, peningkatan kualitas sistem digital, serta pengembangan mekanisme pengawasan yang lebih adaptif. Faktor-faktor tersebut menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan WFA di sektor publik.

DAFTAR REFERENSI

- Bataha, K., & Fauziah, S. (2020). Persepsi Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Efektivitas Implementasi Work from Home. *Public Administration Journal of Research*, 2(4), 345–356.
- Fauziah, D. P., Mubarak, M. A., & Siswanto, P. H. (2026). Penerapan Work from Anywhere pada Badan Kepegawaian Negara. *Prosiding Seminar Nasional UNARS*, 4(1), 64–73.
- Kompas. (2025). *Instruksi Lengkap Presiden Prabowo untuk Efisiensi Anggaran Rp306 Triliun*. <https://www.kompas.id/artikel/instruksi-lengkap-presiden-prabowo-untuk-efisiensi-anggaran-rp-306-triliun>
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40.
- Siregar, L. Y., & Febrina, R. (2022). Efektivitas Kebijakan Work from Home pada Masa Pandemi COVID-19. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1). <https://doi.org/10.31629/kemudi>
- Suciyawati, N. P. (2025). Dampak Penerapan Skema Work from Anywhere (WFA) terhadap Kinerja Pegawai di Denpasar. *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 27(3), 406–416.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan, dan Peran di Bidang Pendidikan. *AFEKSI: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 4(2), 198–207.